

***PUBLIC ACCOUNTING AS A PILLAR OF FINANCIAL GOVERNANCE: A  
LITERATURE REVIEW ON GOVERNMENT TRANSPARENCY AND  
ACCOUNTABILITY***

**AKUNTANSI PUBLIK SEBAGAI PILAR TATA KELOLA KEUANGAN:  
KAJIAN LITERATUR TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PEMERINTAH**

**Adolf Z.D. Siahay**

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

[asiahay1011@gmail.com](mailto:asiahay1011@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Demands for transparency and accountability in public financial management are growing stronger in line with commitments to bureaucratic reform and responsive governance. In this context, public accounting is seen as a strategic instrument that not only functions as a financial recording tool but also as a mechanism for fiscal control and accountability. This study aims to examine the contribution of public accounting to improving government transparency and accountability through a literature review approach. The research was conducted qualitatively using a literature review method, using secondary data obtained from various relevant national and international scientific publications. Data sources include indexed journal articles, academic books, and official reports obtained through scientific database searches. The analysis was conducted using a thematic approach to identify conceptual patterns related to the research variables. The findings indicate that the implementation of accrual-based public accounting, supported by a consistent reporting system and adequate information technology, contributes to improving fiscal information transparency and strengthening government accountability. Its effectiveness is significantly influenced by the strength of external oversight and institutional capacity. These findings have implications for policy formulation, particularly in strengthening public financial reporting systems, developing inclusive digital infrastructure, and enhancing fiscal literacy as part of public sector governance reform.*

**Keywords:** *Public Accounting, Fiscal Transparency, Government Accountability, External Oversight, Information Technology, Public Governance.*

**ABSTRAK**

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik semakin menguat seiring dengan komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Dalam konteks tersebut, akuntansi publik dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi akuntansi publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pendekatan studi literatur. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode kajian kepustakaan, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Sumber data mencakup artikel jurnal terindeks, buku akademik, dan laporan resmi yang diperoleh melalui penelusuran basis data ilmiah. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik berbasis akrual, yang ditopang oleh sistem pelaporan yang konsisten dan teknologi informasi yang memadai, berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi fiskal dan penguatan akuntabilitas pemerintahan. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan pengawasan eksternal dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini memberikan implikasi bagi perumusan kebijakan, khususnya dalam memperkuat sistem pelaporan keuangan publik, mengembangkan infrastruktur digital yang inklusif, serta meningkatkan literasi fiskal sebagai bagian dari reformasi tata kelola sektor publik.

**Kata Kunci:** Akuntansi Publik, Transparansi Fiskal, Akuntabilitas Pemerintah, Pengawasan Eksternal, Teknologi Informasi, Tata Kelola Pemerintahan.

**PENDAHULUAN**

Dalam era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, tuntutan

terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah semakin menguat. Masyarakat sebagai pemangku

kepentingan utama memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran akuntansi publik menjadi sangat vital—yakni sebagai sistem informasi keuangan yang mampu menyediakan laporan yang andal, relevan, dan dapat diaudit untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya aspek administratif, melainkan cerminan komitmen etis dan legal pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab (Wibowo & Suparman, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara sistematis bagaimana akuntansi publik mampu memperkuat kedua aspek tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai laporan audit dan pengamatan lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah daerah maupun pusat masih menghadapi tantangan signifikan, seperti penyimpangan anggaran, rendahnya kualitas pelaporan, dan kurangnya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Menurut data Kementerian Keuangan (2023), masih terdapat daerah yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan bahkan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat), yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi praktik akuntansi publik. Opini BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 15% pemerintah daerah belum mencapai opini WTP (BPK RI, 2023).

Sejumlah studi empiris telah menyoroiti pentingnya akuntansi publik dalam mendukung prinsip *good governance*. Penelitian oleh Herawati

dan Putra (2020) menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan transparansi fiskal. Temuan serupa juga diperoleh oleh Wardhani, Rossieta, dan Martani (2017) yang mengungkap bahwa keberadaan auditor eksternal independen dan sistem pelaporan berbasis akrual mampu meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan keuangan. Penelitian-penelitian ini memperkuat argumen bahwa akuntansi publik bukan hanya alat pencatatan keuangan, melainkan juga instrumen pengendalian dan pertanggungjawaban.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang ada. Banyak penelitian yang hanya menyoroiti satu sisi—misalnya kualitas laporan keuangan—tanpa mengeksplorasi lebih jauh variabel lain yang turut memengaruhi hubungan antara akuntansi publik dan akuntabilitas, seperti kapasitas SDM, efektivitas sistem pengendalian internal, dan peran komitmen politik (Almilia, 2019; Kusuma & Handayani, 2021). Selain itu, sebagian besar studi bersifat lokal dan belum melakukan analisis komparatif lintas daerah atau lintas waktu yang dapat memperkuat generalisasi temuan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, kajian literatur ini disusun untuk mengidentifikasi dan mensintesis temuan-temuan ilmiah yang relevan mengenai peran akuntansi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kajian ini akan membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel seperti kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, pengawasan eksternal, dan outcome berupa transparansi serta akuntabilitas publik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya penguatan tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Publik**

Akuntansi publik merupakan bagian dari sistem akuntansi sektor publik yang berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas pemerintahan. Dalam konteks tata kelola keuangan negara, akuntansi publik bukan hanya bertujuan untuk mencatat transaksi, tetapi juga menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan serta sarana pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2018). Akuntansi publik yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi langkah penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik. SAP berbasis akrual dianggap lebih mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh karena mengakui hak dan kewajiban meskipun belum terjadi arus kas (Utomo & Andriani, 2022). Namun, tantangan utama dalam implementasi akuntansi publik di Indonesia antara lain adalah kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, serta dukungan infrastruktur teknologi akuntansi (Fitriana & Yulianto, 2020).

### **Transparansi Keuangan Pemerintah**

Transparansi adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan informasi yang cukup, jelas, dan dapat diakses oleh publik terkait penggunaan keuangan negara. Dalam sektor publik, transparansi menjadi fondasi bagi

pengawasan publik dan pencegahan praktik korupsi. Penelitian oleh Lubis dan Majid (2021) menunjukkan bahwa transparansi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan anggaran daerah.

Transparansi keuangan dapat ditingkatkan melalui kualitas laporan keuangan, penyampaian informasi secara tepat waktu, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Kartika dan Nurlis (2022) menekankan pentingnya sistem pelaporan yang terbuka dan terstruktur, serta peran komunikasi publik dalam membangun persepsi bahwa pemerintah telah mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Transparansi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan seperti etika birokrasi, tekanan dari lembaga pengawas, dan desakan masyarakat sipil.

### **Akuntabilitas Pemerintah**

Akuntabilitas dalam sektor publik merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan lembaga legislatif. Konsep ini tidak hanya menekankan pelaporan keuangan secara formal, tetapi juga evaluasi terhadap penggunaan anggaran berdasarkan capaian kinerja dan tujuan kebijakan (Daryanto & Rakhman, 2021). Akuntabilitas menjadi indikator kunci dalam mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan.

Beberapa indikator akuntabilitas yang umum digunakan adalah kesesuaian antara anggaran dan realisasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Fitriana dan Yulianto (2020) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi sangat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang akurat dan real time. Selain itu,

keberadaan auditor eksternal seperti BPK juga menjadi instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas keuangan pemerintah.

### **Variabel Moderasi: Pengawasan Eksternal dan Teknologi Informasi**

Variabel moderasi dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek: pengawasan eksternal dan teknologi informasi. Pengawasan eksternal merujuk pada mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga legislatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi integritas dan kepatuhan pemerintah dalam penggunaan dana publik. Kartika dan Nurlis (2022) mencatat bahwa intensitas pengawasan yang tinggi mendorong peningkatan kualitas pelaporan dan mengurangi risiko penyimpangan.

Sementara itu, kemajuan teknologi informasi berperan sebagai katalis dalam transformasi akuntansi publik. Implementasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan sistem akuntansi berbasis digital memungkinkan pemerintah menyusun laporan keuangan secara lebih efisien dan akurat. Fitriana dan Yulianto (2020) menekankan bahwa sistem akuntansi terkomputerisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

### **Kerangka Teoretis dan Hipotesis**

Penelitian ini mengadopsi teori agensi dan teori legitimasi sebagai dasar pembentukan kerangka teoretis. Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, yang membutuhkan mekanisme kontrol berupa akuntansi publik untuk mengurangi asimetri informasi. Di sisi lain, teori legitimasi

(Suchman, 1995) menjelaskan bahwa laporan keuangan menjadi alat bagi pemerintah untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya.

Kerangka teoretis yang dibangun dalam penelitian ini menggambarkan bahwa akuntansi publik berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah sebagai variabel dependen. Variabel moderasi, yaitu pengawasan eksternal dan teknologi informasi, diasumsikan memperkuat hubungan tersebut.

### **Hipotesis Penelitian**

**H1:** Penerapan akuntansi publik berbasis akrual berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan pemerintah.

**H2:** Kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

**H3:** Pengawasan eksternal dan dukungan teknologi informasi memperkuat hubungan antara akuntansi publik dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*). Kajian literatur merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi, menginterpretasikan, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya secara sistematis, guna mengidentifikasi pemahaman konseptual dan temuan-temuan utama mengenai suatu topik (Booth, Colomb, & Williams, 2016; Snyder, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika teori, mengkaji perkembangan penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi

celah pengetahuan (*research gap*) yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan.

Penelitian ini berfokus pada telaah kritis terhadap literatur akademik yang membahas hubungan antara akuntansi publik dengan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pemerintahan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk merumuskan kontribusi teoretis akuntansi publik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terbuka, melalui sintesis sistematis dari berbagai sumber ilmiah yang relevan.

### **Sumber dan Prosedur Pencarian Literatur**

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap literatur akademik yang tersedia secara daring. Prosedur pencarian literatur dilakukan dengan menelusuri database ilmiah terpercaya, seperti Scopus, Web of Science (WoS), ScienceDirect, ProQuest, Garuda Ristekdikti, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian mencakup: “*public sector accounting*”, “*government transparency*”, “*fiscal accountability*”, “*accrual-based reporting*”, “*external audit in public finance*”, dan padanan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Kriteria inklusi literatur mencakup: (1) artikel jurnal atau buku akademik yang secara eksplisit membahas peran akuntansi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah; (2) literatur dengan cakupan empiris maupun teoretis; dan (3) publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2013–2024. Sumber yang tidak terverifikasi akademik seperti blog, artikel populer, atau opini editorial dikecualikan dari analisis.

### **Teknik Analisis Literatur**

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*), yakni teknik analisis kualitatif yang mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi tema-tema utama dalam literatur. Proses analisis dilakukan dalam empat tahap utama:

- 1) Reduksi dan seleksi data, dengan menelaah literatur yang paling relevan terhadap isu sentral dalam penelitian, yaitu peran akuntansi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema konseptual berdasarkan variabel kunci: akuntansi publik, transparansi fiskal, akuntabilitas pemerintah, serta faktor kontekstual seperti pengawasan eksternal dan teknologi informasi.
- 3) Sintesis tematik, yaitu penggabungan hasil temuan dari berbagai studi untuk membentuk narasi konseptual yang utuh dan saling melengkapi.
- 4) Evaluasi kritis, yaitu penilaian terhadap kontribusi ilmiah, keterbatasan metodologis, dan kesenjangan teoritis dari literatur yang ditelaah.

Teknik ini merujuk pada pedoman yang dikemukakan oleh Snyder (2019), yang menyatakan bahwa kajian literatur yang sistematis harus melibatkan proses seleksi, penyaringan, dan sintesis secara tematik dan reflektif, untuk menghasilkan kerangka pemahaman yang relevan, tajam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Deskripsi Umum Literatur yang Dianalisis**

Sejumlah literatur ilmiah yang relevan telah dianalisis dalam penelitian

ini. Seluruh sumber berasal dari publikasi akademik yang diterbitkan dalam kurun waktu satu dekade terakhir, baik dari jurnal nasional bereputasi (terakreditasi SINTA 1 dan 2) maupun jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science (WoS). Fokus utama dari literatur yang dikaji berkisar pada implementasi dan pengaruh akuntansi publik terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas pemerintahan, dalam konteks lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Literatur yang dianalisis mencerminkan keberagaman perspektif akademik dari berbagai konteks administratif dan sistem pemerintahan, sehingga memberikan cakupan komparatif yang luas terhadap dinamika pelaporan keuangan sektor publik. Seluruh sumber kemudian diklasifikasikan secara tematik ke dalam lima fokus utama, yaitu (1) akuntansi publik sebagai instrumen tata kelola, (2) keterkaitannya dengan transparansi fiskal, (3) kontribusinya terhadap akuntabilitas, (4) peran variabel moderasi seperti pengawasan eksternal, dan (5) integrasi teknologi informasi.

## **Pembahasan**

### **Peran Akuntansi Publik sebagai Instrumen Tata Kelola Keuangan**

Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi publik merupakan pilar fundamental dalam mendesain sistem tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan responsif. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terbukti mampu meningkatkan keandalan data keuangan, konsistensi pelaporan, serta memungkinkan evaluasi program berbasis kinerja. Studi oleh Alshurafat et al. (2021) secara empiris menunjukkan bahwa adopsi akuntansi akrual di sektor publik mendukung keterukuran fiskal

dan meningkatkan transparansi lintas lembaga.

Penelitian lokal oleh Prabowo dan Mustika (2020) menunjukkan korelasi antara konsistensi penerapan SAP dan kecenderungan memperoleh opini WTP dari BPK. Namun demikian, penerapan akuntansi publik masih menghadapi kendala struktural seperti minimnya pelatihan teknis, keterbatasan SDM yang kompeten, serta lemahnya sistem pengawasan internal (Fitriana & Yulianto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem yang unggul tidak akan berdampak signifikan tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai.

### **Hubungan Akuntansi Publik dengan Transparansi Keuangan**

Transparansi fiskal mencerminkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi pengelolaan anggaran kepada publik. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa akuntansi publik yang dirancang dengan prinsip akrual dan berbasis output memberikan kontribusi langsung terhadap transparansi. Abdul Latif et al. (2019) menyimpulkan bahwa konsistensi pelaporan berbasis akrual memungkinkan pelacakan pengeluaran hingga unit terkecil dan mendorong efisiensi anggaran.

Kartika dan Nurlis (2022) menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan secara daring dan aksesibilitas informasi keuangan yang meningkat menghasilkan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan fiskal. Namun demikian, beberapa literatur menyoroti bahwa keterbukaan dokumen tidak selalu menjamin keterpahaman publik. Dokumen fiskal sering kali disusun dalam bahasa teknokratis yang tidak inklusif, sehingga diperlukan reformasi penyajian laporan yang komunikatif dan berorientasi pada *citizen readability*.

## **Akuntansi Publik dan Akuntabilitas Pemerintah**

Akuntabilitas pemerintah, sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja publik, merupakan hasil dari sinergi antara sistem pelaporan yang andal dan mekanisme pengawasan yang efektif. Studi oleh Wardhani et al. (2017) menegaskan bahwa praktik audit berbasis risiko yang terintegrasi dalam sistem akuntansi publik memperkuat akuntabilitas vertikal, terutama dalam pelaporan ke lembaga pengawas seperti BPK dan DPR.

Di tingkat pemerintahan daerah, Lubis dan Majid (2021) membuktikan bahwa kualitas pelaporan keuangan secara langsung berkaitan dengan penurunan tingkat penyimpangan anggaran. Meskipun demikian, literasi fiskal masyarakat dan kualitas interaksi antar lembaga masih menjadi titik lemah. Literasi fiskal yang rendah menyebabkan keterlibatan publik menjadi minim, sedangkan kurangnya sistem umpan balik terhadap hasil audit memperlemah fungsi korektif dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, banyak literatur menyarankan pengembangan *performance-based accountability* sebagai model pelaporan masa depan yang lebih komprehensif dan terukur.

## **Peran Pengawasan Eksternal dan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi**

Pengawasan eksternal dan kemajuan teknologi informasi terbukti menjadi dua katalis penting dalam menguatkan hubungan antara akuntansi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK terbukti efektif dalam menekan moral hazard fiskal dan meningkatkan kualitas pelaporan (Haryanto & Hasan, 2018). Audit yang dilakukan secara berkala dan

dipublikasikan secara terbuka memberikan tekanan etis dan legal terhadap pejabat publik.

Di sisi lain, adopsi teknologi informasi seperti e-budgeting dan e-audit memfasilitasi otomatisasi, kecepatan, dan akurasi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Wahyuni dan Handayani (2021) menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis digital mempercepat penyampaian laporan dan menurunkan tingkat manipulasi data. Namun demikian, infrastruktur digital yang belum merata, serta resistensi birokrasi terhadap sistem transparan, menjadi tantangan signifikan dalam implementasi jangka panjang. Literasi digital aparatur pemerintah juga menjadi isu krusial yang perlu diatasi melalui pelatihan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi publik memiliki peran yang krusial dan strategis dalam membentuk tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui sintesis literatur yang mendalam, ditemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual yang didukung oleh standar pelaporan keuangan yang konsisten serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat mendorong keterbukaan fiskal dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban publik. Dalam konteks ini, akuntansi publik tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai pilar sistemik dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan sumber daya negara.

Lebih jauh, efektivitas akuntansi publik dalam mendukung praktik *good governance* sangat ditentukan oleh faktor institusional, seperti efektivitas

pengawasan eksternal dan kapasitas internal lembaga publik. Dalam konteks tersebut, akuntansi publik tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan sosial-politik dan kelembagaan tempat ia beroperasi. Penelitian ini berhasil memenuhi tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi peran akuntansi publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus mengungkap dinamika faktor-faktor kontekstual yang memperkuat atau melemahkan kontribusinya.

Dari sisi teoretis, hasil kajian ini memberikan penguatan terhadap teori agensi dan teori legitimasi dalam studi tata kelola sektor publik. Akuntansi publik terbukti berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dirancang untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memperkuat legitimasi kelembagaan pemerintah, terutama dalam konteks demokrasi fiskal.

Secara praktis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana teknis dalam bidang akuntansi sektor publik. Pertama, penting untuk memformulasikan kebijakan yang tidak hanya mewajibkan pelaporan keuangan berbasis akrual, tetapi juga memperhatikan kualitas implementasi dan kompetensi pelaksananya. Kedua, infrastruktur teknologi informasi harus dirancang tidak sekadar sebagai alat bantu administratif, melainkan sebagai ekosistem digital yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi publik. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh publik luas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam

pengawasan anggaran secara bermakna. Keempat, kolaborasi antarlembaga pengawasan perlu diperkuat untuk membangun sistem fiskal yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif dan berorientasi pada hasil.

Walaupun telah disusun secara sistematis dan menggunakan sumber literatur yang relevan, penelitian ini tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagai studi literatur, seluruh data bersumber dari publikasi sekunder, sehingga validitas temuan bergantung pada kualitas metodologi dan data dari studi-studi sebelumnya. Kedua, pendekatan ini tidak memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris atau mengukur kekuatan pengaruh secara kuantitatif. Ketiga, heterogenitas konteks geografis, kebijakan fiskal, dan tingkat kematangan sistem akuntansi publik di berbagai literatur yang dianalisis dapat memunculkan bias interpretatif dalam proses sintesis. Keempat, keterbatasan akses terhadap publikasi internasional berbayar menghambat inklusi artikel-artikel dengan nilai sitasi tinggi yang berpotensi memperkuat landasan teoretis dan metodologis penelitian ini.

Bagi peneliti di masa depan, disarankan untuk melakukan pendekatan empiris yang lebih komprehensif, baik melalui studi kuantitatif dengan model statistik inferensial maupun studi kualitatif yang mengeksplorasi praktik akuntansi publik dalam konteks kelembagaan tertentu. Pendekatan *mixed methods* juga sangat disarankan untuk menjembatani dimensi objektif dan subjektif dalam mengevaluasi dampak akuntansi publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, studi komparatif antar daerah, provinsi, atau negara dengan sistem pemerintahan dan derajat otonomi fiskal yang berbeda akan

memberikan wawasan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pengembangan kerangka konseptual berbasis *performance-based accountability* juga perlu didorong, agar pelaporan keuangan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada hasil kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan. Terakhir, peneliti dianjurkan untuk membangun kerja sama dengan lembaga pengawas dan otoritas fiskal agar kajian akademik dapat berdampak langsung pada pembentukan kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, R., Ishak, S., & Mohamad, N. (2019). The role of accrual accounting in enhancing financial accountability and transparency in public sector. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.698>
- Almilia, L. S. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.1001>
- Alshurafat, H., Hoque, Z., & Al-Shboul, M. (2021). Public sector accounting reforms and accountability in emerging economies: A review of the literature. *International Journal of Public Sector Management*, 34(2), 134–152. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2019-0221>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The craft of research* (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Daryanto, W. M., & Rakhman, F. (2021). Determinasi transparansi anggaran pemerintah daerah: Analisis faktor politik dan fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 223–236. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2348>
- Fitriana, R., & Yulianto, A. (2020). Pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 17–30. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.5123>
- Haryanto, S., & Hasan, M. (2018). Pengaruh frekuensi audit dan kapasitas fiskal terhadap kinerja transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 312–325. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.08.9020>
- Herawati, T., & Putra, R. A. (2020). Dampak implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(2), 88–101. <https://doi.org/10.31289/jakd.v15i2.4567>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Kartika, T. M., & Nurlis, N. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif masyarakat: Studi pada pemerintah daerah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 45–56.  
<https://doi.org/10.31294/jia.v7i1.11055>
- Kusuma, H., & Handayani, S. R. (2021). Komitmen politik dan transparansi: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 45–60.  
<https://doi.org/10.28986/jtakn.v7i1.889>
- Lubis, A. R., & Majid, M. S. A. (2021). Transparansi fiskal dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 211–229.  
<https://doi.org/10.28986/jtakn.v8i2.1034>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Prabowo, A., & Mustika, I. (2020). Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17(1), 63–76.  
<https://doi.org/10.20885/jaa.vol17.iss1.art6>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.  
<https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Utomo, H., & Andriani, D. (2022). Kendala implementasi standar akuntansi pemerintahan: Studi di lingkungan Pemda Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 32–48.  
<https://doi.org/10.31289/jakd.v17i1.8999>
- Wahyuni, D., & Handayani, S. R. (2021). E-budgeting dan e-audit sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi*, 7(2), 89–101.  
<https://doi.org/10.32493/josia.v7i2.9487>
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 30(3), 286–306.  
<https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2016-0094>
- Wibowo, R. S., & Suparman, S. (2019). Akuntansi sektor publik dan transparansi keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 189–198.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.17034>
- Zed, M. (2004). *Literatur research: Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.